



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 40 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

BUPATI PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - c. bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan;
 - d. bahwa . . .

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 57);

6. Peraturan . . .

6. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 15);
7. Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2022 Nomor 16);
8. Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 22);
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2023 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023 Nomor 37) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 19 Desember 2024

Pj. BUPATI PATI,

ttd.

SUJARWANTO DWIATMOKO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 19 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI

ttd.

JUMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRWANTO, SH., MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001

**PERUBAHAN RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN PATI TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan serta pagu indikatif sub kegiatan. Dalam perjalanan pelaksanaannya, Renja Perangkat Daerah ini dimungkinkan terjadi perubahan dengan asumsi adanya penyesuaian arah kebijakan, kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah, penurunan pendapatan daerah, penyesuaian rencana program, kegiatan dan sub kegiatan serta mempertimbangkan keadaan yang menyebabkan SiLPA anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. Dengan demikian perubahan Renja dilakukan agar tetap berusaha menjaga target sasaran dan indikator pembangunan yang telah ditargetkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 maupun perubahannya dengan melakukan beberapa penyesuaian

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Perubahan RKPD yang telah ditetapkan dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah kabupaten sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.

Untuk mensikapi perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan prioritas daerah serta

penyesuaian akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, dan untuk mencapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi inilah yang melatarbelakangi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati melaksanakan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024. Selanjutnya dokumen Perubahan Renja Tahun 2024 ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Tahun 2024 untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2024 ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah beberapa kali dan terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

6. Kepmendagri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran, Kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pati Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
10. Peraturan Bupati Pati Nomor 16 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026;
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja;
12. Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2025.
13. Surat Edaran Bupati Pati Nomor 050/1637.7 tentang Pedoman Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 dalam rangka Perubahan RKPD Tahun 2024 sebagai Landasan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun 2024.

3. Maksud dan Tujuan

3.1 Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2024 adalah untuk menjabarkan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023-2026 dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi perangkat daerah tahun 2024 yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan guna mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah.

3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah :

- 1) Menjabarkan tentang tujuan dan sasaran Perangkat Daerah yang didukung dengan program-program prioritas, kegiatan beserta anggaran;

- 2) Perubahan Renja disusun untuk menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan ketercukupan anggaran yang tertuang pada Perubahan RKPD Tahun 2024 dalam upaya pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, karena dinamika pelaksanaan pembangunan dan permasalahan yang dihadapi;
- 3) Mewujudkan keterpaduan perencanaan dan mensinergikan pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber ke dalam operasional program dan kegiatan sesuai dokumen perencanaan yang disusun dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- 4) Tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Dinas Tenaga Kerja untuk menyusun Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun 2024 dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 5) Mewujudkan efisiensi, efektivitas serta tepat sasaran dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

3. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 , Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2024 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika Penulisan

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024;

1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat daerah;
2. Analisis Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2024;
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

BAB III	:	RENCANA	KERJA	DAN	PENDANAAN	PERANGKAT
		DAERAH;				
BAB IV	:	PENUTUP				

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

1. Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II Tahun 2024 ada beberapa program kegiatan sub kegiatan yang belum optimal dalam pelaksanaannya untuk mencapai target kinerja. Capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024, terdapat 5 (lima) indikator yang belum bisa dianalisis karena data dari BPS yang belum rilis dan data bersifat tahunan. Indikator tersebut antara lain :

1. Indeks elastisitas kesempatan kerja;
2. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK);
3. Peningkatan produktivitas tenaga kerja;
4. Rasio realisasi / target yang ditetapkan di RTK;
5. Persentase Kapasitas SDM pada Angkatan Kerja.

Hasil capaian kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 capaian kinerja yang sama atau melebihi target target yaitu :

1. Pertumbuhan penempatan tenaga kerja;
2. Persentase Tenaga Kerja yang terserap;
3. Persentase peningkatan penyelesaian hubungan industrial;
4. Rasio Perselisihan antara pengusaha dan pekerja.

Untuk lebih rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja 2024 Kabupaten Pati berikut ini:

Tabel 2.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati

No.	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
A.	IK Renstra PD 2023-2026											
1	Indeks Elastisitas Kesempatan Kerja			1,7 Angka	1,4 Angka	1,15 Angka	0,9 Angka	0,77 Angka	0,77 Angka	0,73 Angka	0,70 Angka	Data 2023 BPS belum rilis (Data perhitungan tahun 2021 dan 2022)
2	Pertumbuhan penempatan tenaga kerja			50%	50%	50%	50%	10,95 %	50%	50%	50%	
3	Persentase peningkatan penyelesaian hubungan industrial			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)			69,15%	69,30%	69,45%	69,60%	73,10%	73,10%	73,30%	73,50%	
5	Peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah			46 Juta/Org	46,5 Juta/Org	47 Juta/Org	47,5 Juta/Org	46,26 Juta/Org	46,26 Juta /Org	47,25 Juta /Org	47,75 Juta /Org	
6	Rasio realisasi / target yang ditetapkan di RTK			0,94 Angka	0,94 Angka	0,94 Angka	0,94 Angka	0 Angka	0 Angka	0,94 Angka	0,94 Angka	Belum dilaksanakan di tahun 2023 dan 2024
7	Persentase Kapasitas SDM pada Angkatan Kerja			31 %	35 %	40 %	45 %	40 %	13 %	42 %	45 %	
8	Persentase Tenaga Kerja yang terserap			65 %	70 %	75 %	82 %	66.22 %	60 %	75 %	82 %	
9	Rasio Perselisihan antara pengusaha dan pekerja			1 Angka	1 Angka	1 Angka	1 Angka	1 Angka	0,5 Angka	1 Angka	1 Angka	
10	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang terselesaikan			100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	50 %	100 %	100 %	

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati Tahun 2024

1. Indeks elastisitas kesempatan kerja tercapai tahun 2023 sebesar 0,77 Angka (data perhitungan tahun 2021 dan 2022) bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kabupaten Pati telah membawa dampak terhadap penyerapan tenaga kerja walaupun sedikit. Diharapkan investor yang menanamkan modal dan berusaha di Kabupaten Pati meningkat sehingga penyerapan tenaga kerja optimal. Untuk realisasi capaian tahun 2024 sampai dengan triwulan II disamakan dengan tahun 2023 karena data bersifat tahunan dan sumber data dari BPS.
2. Pertumbuhan penempatan tenaga kerja belum tercapai tahun 2023 sebesar 10,95% disebabkan oleh sebagian pencaker belum mau ditempatkan di luar kota, pencaker belum berkompetensi, kurikulum pendidikan vokasi untuk lebih ke skill digital, pencaker masih memilih lowongan kerja yang diinginkan. Upaya dilakukan untuk meningkatkan penempatan dengan melaksanakan job canvassing, job fair/bursa kerja, bimbingan jabatan, koordinasi dengan dinas pendidikan, revitalisasi pendidikan vokasi, pelatihan vokasi, dan peningkatan uji kompetensi. Untuk realisasi capaian tahun 2024 sampai dengan triwulan II sebesar 50% karena data bersifat tahunan jadi untuk perhitungan belum selesai.
3. Persentase peningkatan penyelesaian hubungan industrial tercapai 100% menunjukkan bahwa perselisihan antara pengusaha dan pekerja berupa perselisihan hak, perselisihan PHK terselesaikan dengan cara perjanjian bersama dan anjuran. Penyelesaian perkara didukung oleh jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama, pencegahan perselisihan dengan sosialisasi peraturan ketenagakerjaan, kunjungan perusahaan, pertemuan dengan Pengusaha, Pekerja dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan harapan kondisi ketenagakerjaan semakin kondusif.
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tahun 2023 mengalami peningkatan dari 71,52% menjadi 73,10 % menunjukan bahwa semakin tinggi pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. Diharapkan penduduk usia produktif semakin aktif dalam perekonomian di Kabupaten Pati. Untuk realisasi capaian tahun 2024 sampai dengan triwulan II memakai data tahun lalu karena sumber data dari BPS ada.

5. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja Daerah tahun 2023 tercapai sebesar Rp. 46,26 Juta/Orang menunjukkan bahwa tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk atau menyelesaikan suatu pekerjaan dengan volume tertentu dalam batas waktu tertentu dalam kondisi standar dan dapat diukur. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan produktivitas adalah Membangun komunikasi dua arah secara efektif, Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan Mengadakan Program Pelatihan Kerja untuk peningkatan kompetensi. Untuk realisasi capaian tahun 2024 sampai dengan triwulan II memakai data tahun lalu karena sumber data dari BPS belum ada.
6. Persentase Kapasitas SDM pada Angkatan Kerja tahun 2023 tercapai sebesar 40 % menunjukkan bahwa tenaga kerja yang mengikuti pelatihan berbasis kompetensi meningkat produktivitasnya sehingga tenaga kerja semakin berkompetensi dalam kejuruan tertentu. Tenaga kerja harus meningkatkan kemampuan demi berhasilnya menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya secara optimal. Maka, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan yang harus dilaksanakan salah satunya melalui pelatihan ketrampilan berbasis kompetensi, pendidikan, pengembangan dan sebagainya. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) yang terakreditasi meningkatkan pelayanan dan kompetensi tenaga kerja. Untuk realisasi capaian tahun 2024 sampai dengan triwulan II tercapai sebesar 13% karena sertifikat uji kompetensi yang belum diterima peserta pelatihan di karenakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BNSP Provinsi Jawa Tengah masih proses sertifikat uji kompetensi.
7. Persentase Tenaga Kerja yang terserap tahun 2023 tercapai 66,22% bahwa tenaga kerja ditempatkan pada lapangan kerja yang ada dibandingkan pencari kerja yang terdaftar sehingga penempatan bisa optimal. Upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan penempatan adalah job canvassing, job fair, info loker lewat media sosial secara masif dan rutin dan melalui program kewirausahaan. Perusahaan belum semuanya melaporkan penempatan tenaga kerja sehingga perlu dilakukan kunjungan dan atensi yang baik. Untuk realisasi capaian tahun 2024 sampai dengan triwulan II tercapai sebesar 60% karena lowongan kerja yang terdaftar dan peningkatan penempatan terpenuhi

sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam industri padat karya.

8. Rasio Perselisihan antara pengusaha dan pekerja tahun 2023 dengan capaian kinerja 1 Angka, bahwa perselisihan di tahun 2023 sejumlah 10 perkara terselesaikan semua dengan cara 8 Perjanjian Bersama (PB) dan 2 Anjuran sehingga antara pengusaha maupun pekerja menerima hasil mediasi. Untuk realisasi capaian tahun 2024 sampai dengan triwulan II tercapai sebesar 0,5 Angka, bahwa perselisihan di tahun ini sejumlah 7 perkara terselesaikan semua dengan cara 7 Perjanjian Bersama (PB).
9. Persentase urusan penunjang pemerintahan yang terselesaikan dengan capaian 100 %, menunjukkan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota mendukung program-program teknis yang dilaksanakan guna mencapai target yang ditentukan. Untuk realisasi capaian tahun 2024 sampai dengan triwulan II tercapai sebesar 50%.

Tabel 2.2
LAPORAN CAPAIAN KINERJA TRI WULAN II
DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PATI
TAHUN 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS	BENTUK DATA	PERHITUNGAN	REALISASI	TARGET 2024	SELISIH	PROGRAM	RENCANA ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
Tujuan : Terjaganya stabilitas Elastisitas Kesempatan Kerja										
1 Indeks Elastisitas Kesempatan Kerja	(% Pertumbuhan penduduk yang bekerja / % Pertumbuhan ekonomi) idealnya 0,5 - 1	Angka	(0 / 0) x 100 %	0	1,4	-1,4	1 Penempatan Tenaga Kerja	230.724.000	70.052.285	30,36
							2 Hubungan Industrial	81.880.000	56.203.250	68,64
Data dari BPS										
Sasaran : Meningkatnya Lapangan Kerja Formal dan Informal										
1 Pertumbuhan Penempatan Tenaga Kerja	(Penempatan tahun n dikurangi Penempatan tahun n-1) / Penempatan tahun n-1) x 100%	Persen	(3231 - 637) / 637 x 100 %	407,22	50	357,22	1 Penempatan Tenaga Kerja	230.724.000	70.052.285	30,36
Sasaran : Meningkatnya kondusivitas hubungan industrial										
1 Persentase peningkatan penyelesaian hubungan industrial	(Rasio perselisihan antara pengusaha dan pekerja tahun n dikurangi tahun n-1) / rasio tahun n-1	Persen	(1 - 1) / 1	100	100	0	1 Hubungan Industrial	81.880.000	56.203.250	68,64

2. Analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun 2024

Hasil evaluasi dari Rencana Kerja Tahun 2024 Triwulan II menunjukkan bahwa:

1. Secara keseluruhan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2024 melaksanakan sebanyak 5 program 20 kegiatan, 46 sub kegiatan, sedangkan yang telah dilaksanakan sebanyak 4 program, 19 kegiatan, 37 sub kegiatan dan 1 program, 1 kegiatan, 9 sub kegiatan yang belum terlaksana. Secara umum sampai dengan Triwulan II ini realisasi capaian keuangan sebesar 31,74% dengan predikat Rendah. Sedangkan untuk realisasi kinerja sebesar 53,04%, dengan predikat Sangat Tinggi.
2. Jumlah sub kegiatan tahun 2024 yang memenuhi target kinerja penyerapan anggaran sebagai berikut (i) antara 46 -100 % sebanyak 16 sub kegiatan atau 34,78 %, (ii) antara 39 – 45 % sebanyak 5 sub kegiatan atau 10,87 %, (iii) antara 33-38 % sebanyak 6 sub kegiatan atau 13,05 %, sedangkan kegiatan yang berada di bawah target kinerja (iv) kurang dari 32 % dengan kriteria Rendah dan Sangat Rendah sebanyak 19 kegiatan atau 41,30 %.
3. Untuk sub kegiatan yang belum tercapai target kinerjanya (Kategori Rendah dan Sangat Rendah) disebabkan karena:
 - Adanya proses pergeseran dan perubahan anggaran;
 - Adanya kegiatan yang masih dalam proses pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan;
 - Pelaksanaan kegiatan pada triwulan 3 dan 4;
 - Proses penentuan lokasi pelaksanaan;
 - Adanya perubahan kebijakan/petunjuk teknis terkait dengan kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD;
 - Proses penyusunan dan penetapan dokumen.
4. Untuk mengatasi hal-hal tersebut dilakukan upaya sebagai berikut :
 - Lebih ditekankan bagi pejabat pelaksana teknis kegiatan pada pejabat penyetaraan dan pelaksana eselon terendah untuk lebih teliti dalam perencanaan dan penentuan jadwal kegiatan yang tepat, sehingga permasalahan yang ada tidak terulang kembali di masa mendatang;
 - Pengusulan kembali pada Perubahan APBD melalui perubahan Renja;

- Percepatan pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban keuangan;
- Koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait;
- Koordinasi dengan OPD pengampu.

Dari hasil analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan, dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran maka Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati akan mengalokasikan penambahan/ pengurangan / pergeseran anggaran terutama pada program dan kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota :
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (pengurangan anggaran);
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (penambahan anggaran);
 - c. Administrasi Umum Perangkat Daerah (penambahan anggaran);
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (penambahan anggaran);
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (penambahan anggaran);
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (penambahan anggaran).
2. Program Perencanaan Tenaga Kerja :
 - a. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) (penambahan anggaran).
3. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja :
 - a. Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi(penambahan anggaran).
4. Program Penempatan Tenaga Kerja :
 - a. Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota (pengurangan anggaran);
 - b. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (pengurangan anggaran);
 - c. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja (pengurangan anggaran);
 - d. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota (pengurangan anggaran).

Uraian lengkap program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat di Tabel 2.3 yang merupakan rekapitulasi Evaluasi Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 Triwulan II.

Tabel 2.3 EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN PATI
PERANGKAT DAERAH DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN PATI
PERIODE PELAKSANAAN TAHUN 2024 TRIWULAN II

INDIKATOR DAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN YANG MENGACU KEPADA SASARAN RKPD :

1. INDEKS ELASTISITAS KESEMPATAN KERJA

2. PERTUMBUHAN PENEMPATAN TENAGA KERJA

3. PERSENTASE PENINGKATAN PENYELESAIAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

4. TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

5. PENINGKATAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA DAERAH

Target : 1,4 Angka

Target : 50 Persen

Target : 100 Persen

Target : 69,30 Persen

Target : Rp. 46,5 Juta / Orang

Realisasi : 0 Angka

Realisasi : 0 Persen

Target : 0 Persen

Target : 0 Persen

Target : Rp. 0 Juta / Orang

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi CapaianKinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD TahunLalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PDTahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD (Tahun 2024) yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026(%)		Unit Penang gung Jawab	Keterangan					
																		14 = 13 / 8 * 100			16 = 15 / 6 *								
									I		II		III		IV			K	Rp		K	Rp			K	Rp	K	Rp	K
1	2	3	4	5	5.A	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13 / 8 * 100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 *		17	18
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
NON URUSAN																													
1	-	2 07 01 201	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase urusanpenunjang pemerintahan yang terselesaikan	Persen	400	23.857.417	100	5.467.124,605	100	6.028.135	25,0	1.543.879,43	25,0	1.521.202,94					50,00	3.065.082,367	50,00	50,85	150	8.532.207	0,38	0,36	Dinas Tenaga Kerja	
		2 07 01 201	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, danEvaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	24	130.252	6	38.101,04	6	67.288	-	-	2	14.897,00					2,00	14.897,000	33,33	22,14	8	52.998	0,33	0,41		
		2 07 01 201	01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	8	22.700	2	4.985	2	45.000	-	-	-	13.924					-	13.924,000	-	30,94	2	18.909	0,25	0,83		
		2 07 01 201	02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	4	14.700	1	3.056	1	3.000	-	-	-	-					-	-	-	-	1	3.056	0,25	0,21		Sampai dengan TW II belum terisi untuk capaian kinerja dan realisasi anggaran (karena anggaran belum di SPJ-kan)
		2 07 01 201	03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Dokumen	4	10.840	1	1.935	1	2.000	-	-	-	-					-	-	-	-	1	1.935	0,25	0,18		Sampai dengan TW II belum terisi untuk capaian kinerja dan realisasi anggaran (karena anggaran belum di SPJ-kan)
		2 07 01 201	06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	15.787	1	3.440	1	3.500	-	-	1	323					1,00	323,000	100,00	9,23	2	3.763	0,50	0,24		
		2 07 01 201	07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	199	66.225	50	24.685,04	50	13.787,50	-	-	3	650					3,00	650,000	6,00	4,71	53	25.335	0,27	0,38		
		2 07 01 202	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumenadministrasi keuangan	Dokumen	128	18.720.278	32	4.174.082,553	32	4.666.433	8	1.214.025,206	8	1.188.716,828					16,00	2.402.742,034	50,00	51,49	48	6.576.825	0,38	0,35		
		2 07 01 202	01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Orang/ bulan	197	18.395.098	47	4.101.213,553	45	4.593.395	45	1.205.785,206	-	1.169.379,828					45,00	2.375.165,034	100,00	51,71	92	6.476.379	0,47	0,35		
		2 07 01 202	02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN	Jumlah Dokumen HasilPenyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	48	291.780	12	65.894	12	66.802	3	8.240	3	17.270					6,00	25.510,000	50,00	38,19	18	91.404	0,38	0,31		
		2 07 01 202	05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganAkhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir TahunSKPD	Laporan	4	6.600	1	990	1	1.000	-	-	-	-					-	-	-	-	1	990	0,25	0,15		Sampai dengan TW II belum terisi untuk capaian kinerja dan realisasi anggaran (dilaksanakan di triwulanIV)

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi CapaianKinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD TahunLalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PDTahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja dan Anggaran Renja PD (Tahun 2024) yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)	Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026(%)	Unit Penanggung Jawab	Keterangan							
									I		II		III		IV														
1	2	3	4	5	5.A	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13 / 8 * 100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 * 100		17	18
						K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
		2 07 01 2.02	07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan KeuanganBulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	104	26.800	26	5.985	26	5.236	-	-	6	2.067			6,00	2.067,000	23,08	39,48	32	8.052	0,31	0,30				
		2 07 01 2.03	01 Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah	Laporan	16	128.360	4	37.200	4	37.200	1	6.200,00	1	9.300,00			2,00	15.500,000	50,00	41,67	6	52.700	0,38	0,41				
		2 07 01 2.03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerahpada SKPD	Laporan	16	128.360	4	37.200	4	37.200	1	6.200,00	1	9.300			2,00	15.500,000	50,00	41,67	6	52.700	0,38	0,41				
		2 07 01 2.05	01 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	Jenis Layanan	8	301.000	-	-	2	72.320	2	72.037,35	-	-			2,00	72.037,350	100,00	99,61	2	72.037	0,25	0,24				
		2 07 01 2.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta AtributKelengkapan	Paket	215	86.000	-	-	62	22.320	62	22.144,50	-	-			62,00	22.144,500	100,00	99,21	62	22.145	0,29	0,26				
		2 07 01 2.05	11 Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Orang	215	215.000	-	-	50	50.000	50	49.892,85	-	-			50,00	49.892,850	100,00	99,79	50	49.893	0,23	0,23				
		2 07 01 2.06	01 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pendukungadministrasi umum perangkat daerah	Jenis	28	759.793	7	248.151,1	7	207.918,3	2	35.789,25	2	63.238,67			4,00	99.027,920	57,14	47,63	11	347.179	0,39	0,46				
		2 07 01 2.06	01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	4	23.000	1	5.384,070	1	5.394	-	-	0,5	2.688,140			0,50	2.688,140	50,00	49,84	2	8.072	0,38	0,35				
		2 07 01 2.06	04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yangDisediakan	Paket	4	441.687	1	115.908	1	119.066,8	0,25	16.659,25	0,25	36.564,03			0,50	53.223,280	50,00	44,70	2	169.131	0,38	0,38				
		2 07 01 2.06	05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket BarangCetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	4	46.053	1	9.802,250	1	12.000	-	-	0,65	7.699,5			0,65	7.699,500	65,00	64,16	2	17.502	0,41	0,38				
		2 07 01 2.06	06 Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	200	10.142	18	2.220	16	2.248,5	2	230,00	7	1.280			9,00	1.510,000	56,25	67,16	27	3.730	0,14	0,37				
		2 07 01 2.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	100	10.800	36	2.979	25	3.000	-	-	7	936			7,00	936,000	28,00	31,20	43	3.915	0,43	0,36				
		2 07 01 2.06	09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD	Laporan	7.285	221.511	625	110.976,732	560	63.759	168	18.900,00	85	11.671			253,00	30.571,000	45,18	47,95	878	141.548	0,12	0,64				
		2 07 01 2.06	10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan ArsipDinamis pada SKPD	Dokumen	80	6.600	36	881	40	2.450	-	-	40	2.400			40,00	2.400,000	100,00	97,96	76	3.281	0,95	0,50				
		2 07 01 2.07	01 Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah	Paket	16	115.500	6	44.814,65	1	11.500	1	11.500,00	-	-			1,00	11.500,000	100,00	100,00	7	56.315	0,44	0,49				
		2 07 01 2.07	02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atauLapangan	Jumlah Unit KendaraanDinas Operasional atau Lapangan yangDisediakan	Unit	2	63.000	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-		Tidak terdanaai di Renja 2024		

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi CapaianKinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD TahunLalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PDTahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD (Tahun 2024) yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026(%)		Unit Penan ggung Jawab	Keterangan						
									I		II		III		IV			K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5	5.A	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13 / 8 * 100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 *		17	18		
						K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p	K	R p				
3	Meningka tnya Lapanga n Kerja Formal dan Informal	2	07	04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase TenagaKerja yang terserap	Persen	73,00	1.220.500	66,22	171.072,350	70	230.724	78,27	37.963,23	60,00	32.089,06			60,00	70.052,285	85,71	30,36	126	241.125	1,73	0,20			
		2	07	04	201	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerjayang ditempatkan	Orang	23.000	765.000	5.502	114.316,100	5.500	166.786	969	32.940,73	2.262	26.514,06			3.231	59.454,785	58,75	35,65	8.733	173.771	0,38	0,23			
		2	07	04	2012	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	Orang	3.000	9.000	-	-	1.000	6.786	917	1.892,00	1.653	325			2.570	2.217,000	257,00	32,67	2.570	2.217	0,86	0,25		Peningkatan penempatan tenagakerja di industri sektor tembakau dan luar negeri	
		2	07	04	2013	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi PencariKerja	Jumlah Pencari Kerjayang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	Orang	300	18.000	-	-	100	5.000	-	895,25	42	550			42,00	1.445,250	42,00	28,91	42	1.445	0,14	0,08			
		2	07	04	2015	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan KesempatanKerja	Orang	80	738.000	16	114.316,10	18	155.000	16	30.153,475	-	25.639,060			16	55.792,535	88,89	36,00	32	170.109	0,40	0,23			
		2	07	04	202	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1(Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerjayang ditempatkan lewat LPTKS	Orang	300	33.000	1.176	9.154	100	18.618	52	1.587,50	359	5.575,00			411	7.162,500	411,00	38,47	1.587	16.317	5,29	0,49		Penempatan tenaga kerja di luarnegeri	
		2	07	04	2022	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	Lembaga	54	33.000	8	9.154	18	18.618	2	1.587,50	2	5.575			4,00	7.162,500	22,22	38,47	12	16.317	0,22	0,49			
		2	07	04	203	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah lowongankerja yang bisa diakses oleh pencari	Orang	23.000	235.000	5.502	47.602,25	5.500	26.792	990	3.435,00	2.294	-			3.284	3.435,000	59,71	12,82	8.786	51.037	0,38	0,22			
		2	07	04	2031	Pemeliharaan dan Operasional AplikasiInformasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar KerjaOnline	Dokumen	48	15.000	12	4.982	12	5.000	3	1.750,00	3	-			6	1.750,000	50,00	35,00	18	6.732	0,38	0,45			
		2	07	04	2033	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair /Bursa Kerja	Orang	14.300	220.000	5.502	42.620,25	3.600	21.792	969	1.685,00	2.262	-			3.231	1.685,000	89,75	7,73	8.733	44.305	0,61	0,20			
		2	07	04	204	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yangditempatkan dari PPPMI	Orang	300	187.500	-	-	100	18.528	52	-	359	-			411	-	411,00	-	411	-	1,37	-		Penempatan tenaga kerja di luarnegeri	
		2	07	04	2041	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/PekerjaMigran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi danDitingkatkan Kompetensinya	Orang	13	85.500	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	#DIV/0!	#DIV/0!	-	-	-	-		Tidak terdanai di Renja 2024	
		2	07	04	2042	Penyediaan Layanan Terpadu pada CalonPekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSAdan PMI Bermasalah yang Ditangani	Orang	300	8.000	-	-	100	5.590	52	-	359	-			411	-	411,00	-	411	-	1,37	-		Penempatan tenaga kerja di luarnegeri	
		2	07	04	2043	Pemberdayaan Pekerja Migran IndonesiaPurna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	Orang	30	94.000	-	-	10	12.938	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-		Sampai dengan TW II belum terisi untuk capaian kinerja dan realisasianggaran (sedang dalam proses penentuan lokasi desa migran produktif)	

No	Sasaran	Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah danProgram / Kegiatan	Indikator Kinerja Program(Outcome), Kegiatan (Output) dan Sub Kegiatan	Satuan	Target Renstra perangkat daerah pada Tahun 2026 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi CapaianKinerja Renstra perangkat daerah s.d. Renja PD TahunLalu (2023)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2024) yang Dievaluasi	Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD (Tahun 2024) yang Dievaluasi	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja PD Tahun 2024(%)		Realisasi Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024	Tingkat Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2026(%)	Unit Penanggun Jawa b	Keterangan																		
									I		II		III		IV			13 = 9 + 10 + 11 + 12						14 = 13 / 8 * 100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 *													
									K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp										
1	2	3	4	5	5.A	6		7		8		9		10		11		12		13 = 9 + 10 + 11 + 12		14 = 13 / 8 * 100		15 = 7 + 13		16 = 15 / 6 *		17	18												
		20705201	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untukPerusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlahPeraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	Persen	200	8.267.700	25	32.059,700	20	32.065	-	8.594,50	10	19.210,50					10,00	27.805,000	50,00	86,71	35	59.865	0,18	0,01														
		2070520103	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial/Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	Laporan	4	8.267.700	1	32.059,700	1	32.065	-	8.594,50	0,5	19.210,50					0,50	27.805,000	50,00	86,71	2	59.865	0,38	0,01														
		20705202	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang terjadi	Perkara	38	327.105	10	49.776,700	11	49.815	4	4.558,00	3	23.840,25					7,00	28.398,250	63,64	57,01	17	78.175	0,45	0,24														
		2070520201	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yangBerakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah kabupaten/ Kota	Jumlah Perselisihanyang Dicegah	Perkara	38	203.808	10	20.885,000	11	20.915	4	2.362,75	3	16.237,25					7,00	18.600,000	63,64	88,93	17	39.485	0,45	0,19														
		2070520202	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yangBerakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terseslesaikan	Perkara	38	38.500	10	8.894,200	11	8.900	4	2.195,25	3	438,00					7,00	2.633,250	63,64	29,59	17	11.527	0,45	0,30														
		2070520204	Pelaksanaan Operasional Lembaga KerjasamaTripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartityang Dibina	Lembaga	4	84.797	1	19.997,500	1	20.000	-	-	0,25	7.165					0,25	7.165,000	25,00	35,83	1	27.163	0,31	0,32														
																		RATA - RATA CAPAIAN KINERJA (%)								50,57	60,26														
																		PREDIKAT KINERJA								ST	ST														
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM																		7.250.539	1.637.513,885		1.827.087,872							3.464.601,757													
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 5)																						53,04	31,74																		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM (PROGRAM 1 S/D PROGRAM 5)																						ST	R																		
FAKTOR PENDORONG KEBERHASILAN KINERJA						: Perencanaan pelaksanaan yang tepat waktu, tepat sasaran																																			
FAKTOR PENGHAMBAT PENCAPAIAN KINERJA						: Tahap persiapan pelaksanaan, Proses penyusunan dokumen, Rekapitulasi kinerja dalam satu tahun, proses penyelesaian sub kegiatan, Proses koordinasi dan konsultasi.																																			
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM TRIWULAN BERIKUTNYA						:																																			
TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN DALAM RENJA PD KABUPATEN/KOTA BERIKUTNYA						:																																			

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tabel 2.4

Capaian Indikator Kinerja Program Urusan Tenaga Kerja

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPD 2023 - 2026	Tahun 2024			Status Capaian	Perangkat Daerah
				Target 2024	Realisasi s.d Tw II	Tingkat Capaian s.d Tw II (%)		
1.	Rasio realisasi / target yang ditetapkan di RTK	Angka	0,94	0,94	0	0	Sangat Rendah	Disnaker
2.	Persentase Kapasitas SDM pada Angkatan Kerja	%	37,75	35	13	37,14	Sangat Rendah	Disnaker
3.	Persentase Tenaga Kerja yang terserap	%	73	70	60	85,71	Tinggi	Disnaker
4.	Rasio Perselisihan antara pengusaha dan pekerja	Angka	1	1	1	100	Sangat Tinggi	Disnaker

Mengacu pada capaian indikator kinerja program Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati tahun 2023-2026, bahwa isu-isu penting yang ada sebagai berikut :

- 1) Capaian pada indikator kinerja Persentase Kapasitas SDM pada Angkatan Kerja masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena Sertifikat uji kompetensi yang belum diterima peserta pelatihan di karenakan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) BNSP Provinsi Jawa Tengah masih memproses sertifikat uji kompetensi dan wilayah cakupan yang luas. Upaya yang dilakukan adalah dengan melaksanakan koordinasi secara intensif dengan LSP BNSP Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Capaian pada indikator kinerja Persentase Tenaga Kerja yang terserap tinggi, hal ini disebabkan lowongan kerja yang terdaftar dan peningkatan penempatan tenaga kerja terpenuhi sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam industri padat karya. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian adalah dengan mengoptimalkan Bursa Kerja Khusus, mengadakan Job Fair secara rutin dan Informasi Pasar Kerja untuk memfasilitasi pencari kerja menemukan pekerjaan sesuai kualifikasi dan menindaklanjuti Perpres No 57 Tahun 2023 tentang

Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan, melalui sosialisasi masif kepada perusahaan untuk melaporkan lowongan pekerjaan tiap bulan.

- 3) Capaian pada indikator kinerja Rasio Perselisihan antara pengusaha dan pekerja sangat tinggi hal ini disebabkan karena perselisihan yang terjadi dapat diselesaikan secara mediasi dengan perjanjian bersama dan anjuran. Beberapa upaya yang dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian adalah dengan melakukan koordinasi dan pembinaan kepada perusahaan dan serikat pekerja serta melakukan pengawasan secara berkelanjutan untuk deteksi dini terhadap resiko terjadinya perselisihan antara pengusaha dan pekerja.

Dalam pencapaian tingkat kinerja layanan Perangkat Daerah ada beberapa permasalahan diantaranya pelayanan informasi pasar kerja : SDM yang ada belum memenuhi persyaratan, pelayanan AK I : pencari kerja setelah mendapat pekerjaan tidak melapor, penempatan Antar Kerja Lokal: sebagian formulir tidak dikembalikan, penempatan Antar Kerja Antar Daerah: sebagian formasi ada yang ditangani perusahaan sendiri, penempatan Antar Kerja Antar Negara: masih banyak Calon Pekerja Migrant Indonesia yang belum kompeten, penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat sebagian besar penyandang cacat belum mempunyai ketrampilan yang sesuai kebutuhan perusahaan, penerbitan rekomendasi IMTA: Tenaga Kerja Asing (TKA) belum melapor dan masih tumpang tindihnya peraturan perijinan untuk TKA bekerja di Kabupaten/Kota, Pelatihan ketrampilan dan kewirausahaan bagi pencari kerja atau masyarakat belum optimal karena sarana prasarana yang belum memadai sehingga minat masyarakat masih kurang. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dan Bursa Kerja Khusus (BKK) ada yang belum perpanjangan ijin operasional dan surat keputusan dari Kementrian Hukum dan HAM untuk pendiriannya sehingga perlu pendataan ulang LPKS dan BKK.

Bidang Hubungan Industrial memerlukan data jumlah tenaga kerja dan data perusahaan guna mengetahui jumlah peserta BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PP, PKB, Kasus Hubungan Industrial, Kondisi Hubungan Industrial di Perusahaan untuk mengambil kebijakan bidang Ketenagakerjaan.

Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah menjadi pemikiran dan tanggungjawab semua personil Disnaker Kabupaten Pati agar permasalahan-permasalahan yang ada dalam pelayanan kepada masyarakat diminimalisir dan mencari terobosan serta inovasi untuk mendapatkan peluang serta memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian tugas pokok dan fungsi Disnaker Kab. Pati terhadap pelayanan masyarakat dapat dirasakan nyaman, tertib, cepat dan tepat.

Yang menjadi tantangan terbesar setiap tahun adalah meningkatnya penduduk usia kerja, angkatan kerja, pengangguran terbuka, terbatasnya kesempatan kerja, kompetensi tenaga kerja dan meningkatnya angka kemiskinan di Kab. Pati. Hal ini dapat direncanakan dan pemecahan masalah tersebut apabila pemangku kepentingan memahami tentang Perencanaan Tenaga Kerja Daerah (PTKD) serta sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan dalam pengurangan pengangguran dan pengentasan kemiskinan karena di PTKD terlihat jumlah angkatan kerja disetiap sektor dengan rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang diambil masing-masing sektor.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini sebagai berikut:

1.1 Non Urusan

1.1.1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja :
 - a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - e) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - d) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD.
- 3) Administrasi Barang Milik Daerah :
 - a) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- 4) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - b) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.
- 5) Administrasi Umum Perangkat Daerah :
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - e) Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
 - g) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.

- 6) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :
 - a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- 7) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 8) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - c) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

1.2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR/ URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

1.2.1 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KEJA

- 1) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) :
 - a) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro;
 - b) Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro.

1.2.2 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

- 1) Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi :
 - a) Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi;
 - b) Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.
- 2) Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta :
 - a) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja.
- 3) Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja :
 - a) Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi.

- 4) Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil :
 - a) Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil.
 - 5) Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota :
 - a) Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.
- PR

1.2.3 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

- 1) Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota :
 - a) Pelayanan Antar Kerja;
 - b) Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja;
 - c) Perluasan Kesempatan Kerja.
- 2) Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota :
 - a) Pengawasan dan Pengendalian LPTKS.
- 3) Pengelolaan Informasi Pasar Kerja :
 - a. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online;
 - b. Job Fair/Bursa Kerja.
- 4) Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota :
 - a) Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran;
 - b) Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan.

1.2.4 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

- 1) Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota :
 - a) Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
- 2) Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota :
 - a) Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;

- b) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
- c) Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 ini dari Anggaran Renja Murni sebesar Rp.6.434.016.000,- bertambah sebanyak Rp. 1.115.523.000,- menjadi Rp.7.549.539.000,-,

Perubahan Renja Tahun 2024 yang mendapatkan **penambahan anggaran** yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 - a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp. 137.532.000,-
 - b. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 22.500.000,-
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sebesar Rp. 27.808.000,-
 - d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya sebesar Rp. 40.524.000,-
2. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi sebesar Rp. 880.000.000,- (DBHCHT).

Penambahan anggaran dari pergeseran antar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
 - a. Kegiatan Administrasi Umum :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor sebesar Rp. 56.000,-
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebesar Rp. 38.150.000,-

b. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 10.080.000,-
- Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sebesar Rp. 9.270.000,-

2. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

a. Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) :

- Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro sebesar Rp. 8.182.000,-
- Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro sebesar Rp. 2.130.000,-

3. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

a. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota :

- Sub Kegiatan Pelayanan Antar Kerja sebesar Rp. 14.101.500,-

b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja :

- Sub Kegiatan Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online sebesar Rp. 2.427.000,-

c. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota :

- Sub Kegiatan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan sebesar Rp. 525.750,-

Pengurangan anggaran dari pergeseran antar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah terdapat pengurangan sebesar Rp. 13.700.000,-

b. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sebesar Rp. 12.000.000,-.

2. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

- a. Kegiatan Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja sebesar Rp. 2.300.000,- dan Sub Kegiatan Perluasan Kesempatan Kerja sebesar Rp. 38.151.000,-.
- b. Kegiatan Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam Satu (1) Daerah Kab./Kota Sub Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian LPTKS sebesar Rp. 428.250,-
- c. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja Sub Kegiatan Job Fair/Bursa Kerja sebesar Rp. 10.000.000,-
- d. Kegiatan Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten / Kota Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran sebesar Rp. 1.175.000,-

Perubahan Renja Tahun 2024 yang **anggaran tetap** yaitu :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja,
Sub Kegiatan :
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.

- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan.
 - e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.
 - f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
3. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
- a. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi dengan Sub Kegiatan :
 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana Lembaga Pelatihan Kerja.
 - b. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta dengan Sub Kegiatan :
 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta.
 - c. Kegiatan Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara Terintegrasi.
 - d. Kegiatan Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil dengan Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil.
 - e. Kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :
 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja.

4. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

- a. Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota dengan dengan Sub Kegiatan :
 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan.
- b. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan :
 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;
 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota.

Selanjutnya lebih jelas terkait dengan Perubahan Rencana Kerja dan kerangka pendanaan dapat dilihat dalam tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1
Perubahan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pati
Tahun 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAMAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		DINAS TENAGA KERJA								6.434.016.000,00	6.530.539.000,00	7.549.539.000,00	1.115.523.000,00						8.927.239.000,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							6.434.016.000,00	6.530.539.000,00	7.549.539.000,00	1.115.523.000,00							8.927.239.000,00	
	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							6.434.016.000,00	6.530.539.000,00	7.549.539.000,00	1.115.523.000,00							8.927.239.000,00	
1.	2.07.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentase urusan penunjang pemerintahan yang terselesaikan				100 %	100 %	5.931.612.000,00	6.028.135.000,00	6.191.823.000,00	138.827.000,00							6.070.439.000,00	
	2.07.01.2.01	Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				6 Doku men	6 Doku men	67.287.500,00	67.287.500,00	53.587.500,00	-13.700.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat	Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati		34.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01 .0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																		
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Doku men	2 Doku men	45.000.000,00	45.000.000,00	31.300.000,00	-13.700.000,00	Kab. Pati, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				1 Doku men	1 Doku men	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			4.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAMAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.01 .0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																		
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Doku men	1 Doku men	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01 .0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																		
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Lapora n	1 Lapora n	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			4.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.01 .0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				50 Lapora n	50 Lapora n	13.787.500,00	13.787.500,00	13.787.500,00	0,00	Kab. Pati, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			17.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administras i keuangan				32 Doku men	32 Doku men	4.569.910.000,00	4.666.433.000,00	4.707.433.000,00	137.523.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat Penurunan	Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati		4.682.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				45 Oran g/b ulan	45 Oran g/b ulan	4.496.872.000,00	4.593.395.000,00	4.634.395.000,00	137.523.000,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			4.600.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAMAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.02.002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																		
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Doku men	12 Doku men	66.802.000,00	66.802.000,00	66.802.000,00	0,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			73.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Lapora n	1 Lapora n	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			2.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.02.007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwul ana n/Semesteran SKPD				26 Lapora n	26 Lapora n	5.236.000,00	5.236.000,00	5.236.000,00	0,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			7.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT ERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah				4 Lapora n	4 Lapora n	37.200.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat	Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati		32.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.03. 0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																		
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4 Lapora n	4 Lapora n	37.200.000,00	37.200.000,00	37.200.000,00	0,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			32.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah				2 Layana n	2 Layana n	72.320.000,00	72.320.000,00	72.320.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat Penurunan	Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati		98.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05. 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																		
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				62 Paket	62 Paket	22.320.000,00	22.320.000,00	22.320.000,00	0,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			28.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.05. 0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																		
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan				50 Oran g	50 Oran g	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kab. Pati, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			70.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pendukung administrasi umum perangkat daerah				7 Jenis Layana n	7 Jenis Layana n	207.918.300,00	207.918.300,00	246.124.300,00	38.206.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat	Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati		200.939.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALISA SI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT ERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																		
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	5.394.000,00	5.394.000,00	5.394.000,00	0,00	Kab. Pati, Pati, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																		
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	119.066.800,00	119.066.800,00	119.122.800,00	56.000,00	Kab. Pati, Pati, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			115.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan																		
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	Kab. Pati, Pati, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			12.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																		
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan				16 Doku men	16 Doku men	2.248.500,00	2.248.500,00	2.248.500,00	0,00	Kab. Pati, Pati, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			2.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																		
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				25 Lapora n	25 Lapora n	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAANMAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																		
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				560 Lapora n	580 Lapora n	63.759.000,00	63.759.000,00	101.909.000,00	38.150.000,00	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			60.439.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																		
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				40 Dokum en	40 Dokum en	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			2.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1 Paket	4 Paket	11.500.000,00	11.500.000,00	34.000.000,00	22.500.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat	Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati		15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	4 Unit	11.500.000,00	11.500.000,00	34.000.000,00	22.500.000,00	Kab. Pati, Pati, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			15.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jasa penunjang urusan pemerintahan daerah				7 Jenis Layana n	7 Jenis Layana n	826.942.000,00	826.942.000,00	842.750.000,00	15.808.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat	Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati		861.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				70 Lapora n	70 Lapora n	1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			1.500.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARG ET AKHI R PERI ODE RENS TRA OPD	REALI SASI CAPA IAN RENJ A OPD TAHU N 2022	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGE T RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAANMAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGK AT DAERAH PENANGG UNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berk urang (10-12)	LOKASI	SUMBE R DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBE LUM	SESU DAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.01.2.08.002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Lapora n	12 Lapora n	224.400.000,00	224.400.000,00	212.400.000,00	-12.000.000,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			240.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.08.004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																		
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Lapora n	12 Lapora n	601.492.000,00	601.492.000,00	629.300.000,00	27.808.000,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			620.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah paket Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				6 Paket	6 Paket	138.534.200,00	138.534.200,00	198.408.200,00	59.874.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat	Dinas Tenaga Kerja Kab. Pati		147.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.01.2.09.002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																		
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				34 Unit	34 Unit	87.984.200,00	87.984.200,00	98.064.200,00	10.080.000,00	Kab. Pati, Pati, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			82.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

[illegible]

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKA T DAERAH PENANGGU NG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkur ang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.03.2.03.0001	Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi																		
			Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				1 Perizin an	1 Perizi nan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah perusahaan kecil yang produktivitasn ya meningkat				6 Perusa ha an	6 Perus aha an	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat	Perusahaan Kecil, UMKM		51.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil																		
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas				10 Perusa h aan	10 Perus ah aan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kab. Pati, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa Kab. Pati, Batangan , Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			51.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan produktivitas tenaga kerja				2 %	2 %	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat	Perusahaan Kecil/UMKM		20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.03.2.05.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja																		
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah				1 Dokum en	1 Doku men	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	Kab. Pati, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			20.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL		DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
4.	2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Terserap				70 %	70 %	230.724.000,00	230.724.000,00	195.724.000,00	68.276.000,00							299.000.000,00	
	2.07.04.2.01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL				1000 Orang	1000 Orang	166.784.500,00	166.786.000,00	140.435.000,00	-26.349.500,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat	Pencari kerja dan Masyarakat		194.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0002	Pelayanan antar Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL				1000 Orang	1000 Orang	6.784.500,00	6.786.000,00	20.886.000,00	14.101.500,00	Kab. Pati, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan				100 Orang	100 Orang	5.000.000,00	5.000.000,00	2.700.000,00	-2.300.000,00	Kab. Pati, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			6.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja																		
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja				18 Orang	18 Orang	155.000.000,00	155.000.000,00	116.849.000,00	-38.151.000,00	Kab. Pati, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			185.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan lewat LPTKS				100 Orang	100 Orang	18.618.250,00	18.618.000,00	18.190.000,00	-428.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat	LPTKS		11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.04.2.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS																		
			Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku				18 Lembaga	18 Lembaga	18.618.250,00	18.618.000,00	18.190.000,00	-428.250,00	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			11.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan				5500 Orang	5500 Orang	26.792.000,00	26.792.000,00	19.219.000,00	-7.573.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat	Pencaker dan Masyarakat		59.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online																		
			Jumlah Data dan Informasi yang Dhasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online				12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	7.427.000,00	2.427.000,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			4.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja																		
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja				3600 Orang	3600 Orang	21.792.000,00	21.792.000,00	11.792.000,00	-10.000.000,00	Kab. Pati, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			55.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah PMI yang ditempatkan dari PPPMI				100 Orang	100 Orang	18.529.250,00	18.528.000,00	17.880.000,00	-649.250,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat	Pekerja Migran Indonesia		35.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.04.2.04.0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran																		
			Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani				100 Orang	100 Orang	5.590.000,00	5.590.000,00	4.415.000,00	-1.175.000,00	Kab. Pati, Pati, Pati Kidul	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			3.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANG KAT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBEL UM	SESUD AH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.04.2.04 .0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan																		
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan				10 Orang	10 Orang	12.939.250,00	12.938.000,00	13.465.000,00	525.750,00	Kab. Pati, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			32.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
5.	2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Rasio perselisihan antara pengusaha dan pekerja				1 Angka	1 Angka	81.880.000,00	81.880.000,00	81.880.000,00	2.069.920.000,00							2.151.800.000, 00	
	2.07.05.2.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan jumlah Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama				20 %	20 %	32.065.000,00	32.065.000,00	32.065.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat	Tenaga Kerja, Pengusaha, SP/SB		2.068.800.000, 00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.01 .0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan																		
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan				1 Lapora n	1 Lapora n	32.065.000,00	32.065.000,00	32.065.000,00	0,00	Kab. Pati, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			2.068.800.000, 00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang terjadi				10 Perkar a	10 Perkar a	49.815.000,00	49.815.000,00	49.815.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan pada peningkatan keberdayaan masyarakat	Tenaga Kerja, Pengusaha, SP/SB		83.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIOD E RENSTR A OPD	REALIS ASI CAPAI AN RENJA OPD TAHU N 2022	PRAKIRA AN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGU NG JAWAB
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berku rang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELU M	SESUDA H	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	2.07.05.2.02 .0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah				10 Perka ra	10 Perka ra	20.915.000,00	20.915.000,00	20.915.000,00	0,00	Kab. Pati, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			51.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02 .0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan				10 Perka ra	10 Perka ra	8.900.000,00	8.900.000,00	8.900.000,00	0,00	Kab. Pati, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			10.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	2.07.05.2.02 .0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina				1 Lemb aga	1 Lemb aga	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kab. Pati, Semua Kecamat an, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFE R UMUM- DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penurunan Kemiskinan dengan menekankan pada peningkatan keberdayaan masyarakat			22.000.000,00	DINAS TENAGA KERJA
	J U M L A H								6.434.016.000,00	6.530.539.000,00	7.549.539.000,00	1.115.523.000,00						8.927.239.000, 00		

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pati Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program, kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Perubahan RKPD Kabupaten Pati Tahun 2024. Hal ini dilakukan untuk menjaga konsistensi capaian kinerja Perangkat Daerah dalam prioritas pembangunan serta untuk menjaga konsistensi perencanaan dan penganggaran. Proses penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2024 berlandaskan pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Pati Tahun 2023-2026. Hal ini dilaksanakan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Daerah yang lebih efektif, efisien dan optimal dalam mencapai sasaran yang sudah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja ini memberikan gambaran hasil analisis kinerja pelayanan perangkat daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Triwulan II, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah, program dan kegiatan, serta rencana kerja dan pendanaan selama periode tahun 2024. Pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja ini dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan dan sasaran perangkat daerah.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta sebagai acuan dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Tahun 2024. Melalui Perubahan Rencana Kerja yang disusun ini diharapkan dapat menjadi acuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun 2024 guna mewujudkan tujuan dan sasaran perangkat daerah sebagaimana renstra perangkat daerah tahun 2023-2026.

Pj. BUPATI PATI,
ttd.

SUJARWANTO DWIATMOKO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IRWANTO, SH., MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19670911 198607 1 001